



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURHASAN
2. Jabatan : REKTOR
3. NHK : 280484

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 6.140.000.000

1. Tanah Seluas 192 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 520.000.000
2. Tanah Seluas 112 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 550.000.000
3. Tanah Seluas 188 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
4. Tanah Seluas 2.256 m² di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI
Rp. 620.000.000
5. Tanah Seluas 425 m² di KAB / KOTA MAGETAN, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 112 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 500.000.000
7. Tanah Seluas 4.306 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 2.700.000.000
8. Tanah Seluas 462 m² di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI
Rp. 250.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 180.000.000

1. MOBIL, TOYOTA RAIZE Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----



D. SURAT BERHARGA	Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	643.309.646
F. HARTA LAINNYA	Rp.	---
Sub Total	Rp.	6.963.309.646
III. HUTANG	Rp.	1.295.811.469
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	5.667.498.177

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.